



Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **LKJIP 2024**

LKjIP

LKjIP



+082338060455



lamongankab.go.id/bapenda



2024

Daftar Isi

Contents

Daftar Isi	1
Daftar Tabel	2
DAFTAR GAMBAR.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
BAB II	24
PERENCANAAN KINERJA	24
BAB III	37
AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
BAB IV	71
PENUTUP.....	71

Daftar Tabel

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	14
Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	15
Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Tabel 4 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah	18
Tabel 5 Anggaran Badan Pendapatan Daerah.....	20
Tabel 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah.....	28
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah.....	31
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Eselon III.....	32
Tabel 9 Perjanjian Kinerja Eselon IV.....	33
Tabel 10 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah.....	38
Tabel 11 Persentase Peningkatan PAD Tahun 2024	39
Tabel 12 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024.....	40
Tabel 13 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024	41
Tabel 14 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44
Tabel 15 Lain-Lain PAD yang Sah	46
Tabel 16 Nilai SAKIP Bapenda Tahun 2024.....	47
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja	48
Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024	49
Tabel 19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	51
Tabel 20 Capaian Kinerja Program	52
Tabel 21 Capaian Kinerja Kegiatan	54
Tabel 22 Capaian Kinerja Sub Kegiatan.....	55
Tabel 23 Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	12
Gambar 2 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	15
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	16
Gambar 4 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Gambar 5 Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dalam Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat:

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;

3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Kabupaten Lamongan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan kami mempunyai fungsi :

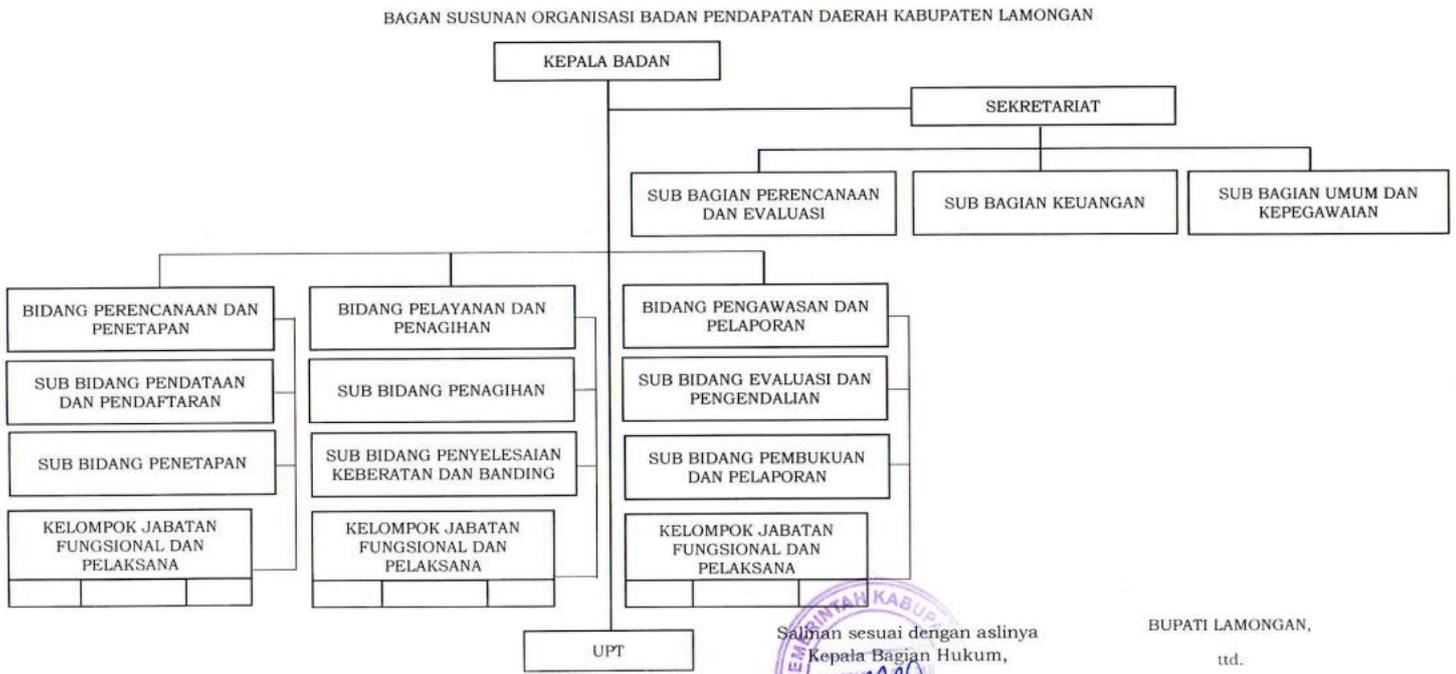
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
4. Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah;
6. Penetapan dan penerbitan pajak daerah; dan
7. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Penetapan;
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Sub Bidang Penetapan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pelayanan dan Penagihan;
 - a. Sub Bidang Penagihan;
 - b. Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengawasan dan Pelaporan;
 - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Lamongan dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

2. Bidang Perencanaan dan Penetapan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Perencanaan dan Penetapan.

3. Bidang Pelayanan dan Penagihan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Pelayanan dan Penagihan.

4. Bidang Pengawasan dan Pelaporan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Pengawasan dan Pelaporan.

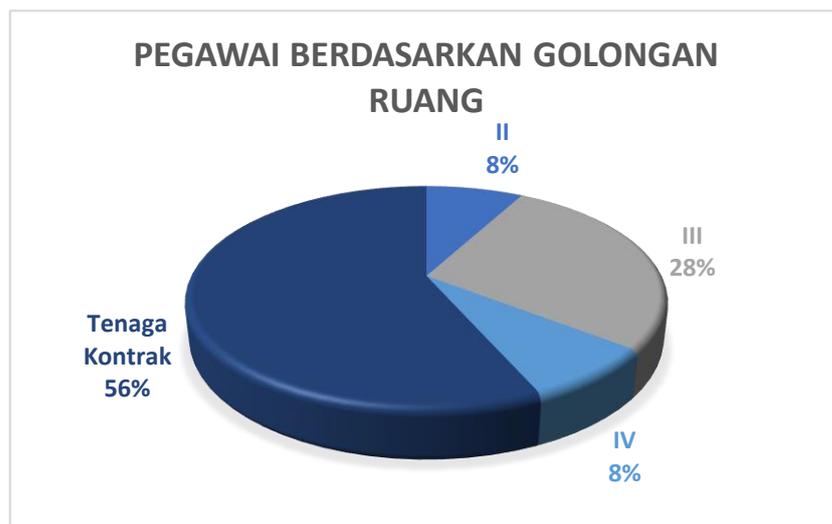
C. Data Umum Organisasi

1. Personil

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2024 sebanyak 79 orang, dengan perincian kondisi riil pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2024

Golongan Ruang	Jumlah
I	-
II	6
III	21
IV	6
Tenaga Kontrak	43
Total	76

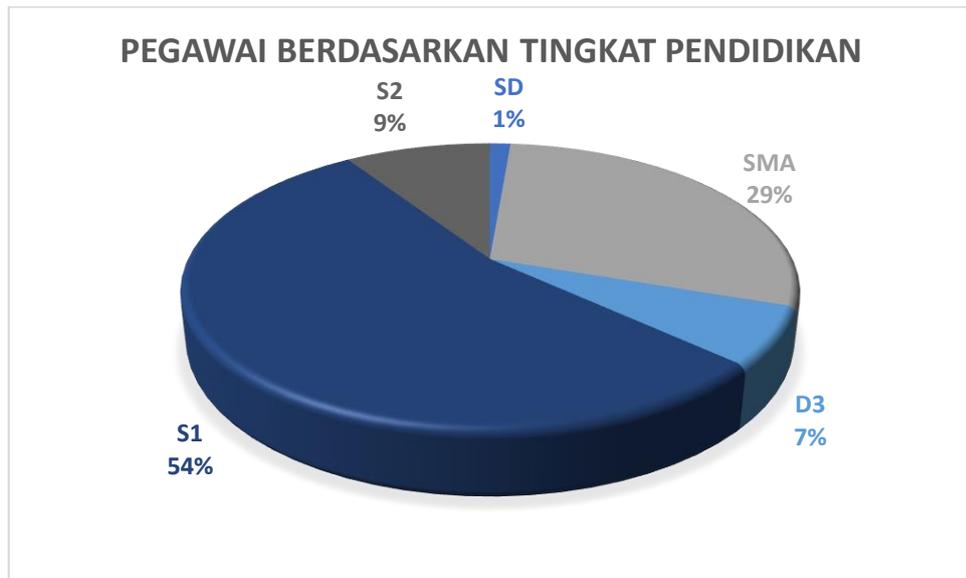


Gambar 2 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2024

Jika dilihat dari tabel dan grafik di atas jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang terbesar adalah golongan III berjumlah 21 orang (28%) selanjutnya golongan IV berjumlah 6 orang (8%), golongan II berjumlah 6 orang (8%), adapun untuk tenaga kontrak berjumlah 43 orang (56%).

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMA	22
3	D3	5
4	S1	41
5	S2	7
Total		76

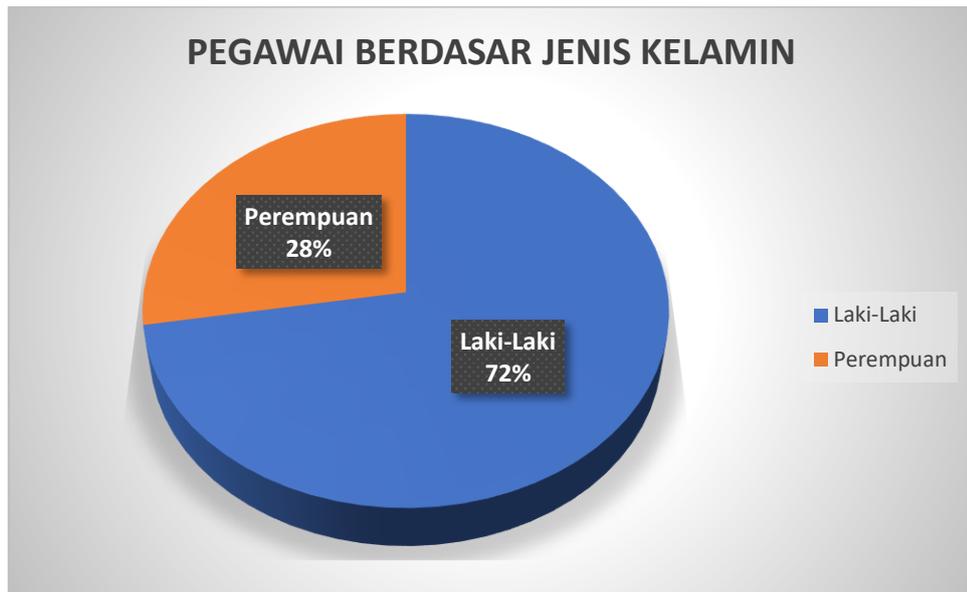


Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, persentase terbesar adalah pegawai dengan tingkat S1 berjumlah 41 orang atau 54%, SMA berjumlah 22 orang atau (29%) selanjutnya tingkat S2 berjumlah 7 orang (9%), D3 berjumlah 5 orang (7%) dan SD berjumlah 1 orang (1%).

Tabel 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	55
2	Perempuan	21
Total		76



Gambar 4 Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024

Jika dilihat dari tabel dan grafik di atas jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dengan persentase terbesar adalah pegawai laki-laki berjumlah 55 orang atau 72%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 21 orang atau 28%.

2. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2024 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NAMA	JUMLAH
AC Unit dan	20
AC Ceiling Casette	2
Alat Penghancur Kertas	2
Lemari Besi/Metal	8
Lemari Buku untuk Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota	1
Lemari Arsip	1
Rak Besi	1
Rak kayu	1
Waslap(Rak kayu)	1
Filing Cabinet Besi	3
Brankas	1
Kardex Besi	1
Kardex Kayu	1
Rotary Filling	1
Locker	1
Lemari Sorok	1
Lemari Kaca	1
Lemari Makan	1
Meja Kerja Besi/Metal	8
Meja Kerja Pejabat Eselon I - IV	29
Meja Kerja Pegawai Non Stuktural	27
Kursi Kerja Pejabat Eselon II- IV	18
Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	1
Kursi Besi Lipat	6
Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Waikota	14
Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	18
Kursi Rapat Pejabat Lain-Lain	7
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1
Meja Panjang	1
Meja Bundar	1
Kursi Rapat	33
Bangku Tunggu	4
Kursi Lipat	6
Meubelair Lain-Lain (Filling Besi/Metal)	2
Meubelair Lain-Lain (Meubelair Lain-Lain)	3
Kamera Drone (Kamera Drone)	0
Camera + Attachmen (Kamera)	7

Peralatan Studio Audio Lain-Lain	4
Tripod Camera	2
CCTV	1
Facsimile (Facsimile)	1
Gigabit Router (Router)	0
GPS (GPS)	2
Handycam	2
Hardisk Server	0
Kabel HDMI	0
Laser Distance Meter	1
Laser Lecia Disto	0
Televisi	2
Mainframe (Komputer Jaringan)	4
Komputer Unit/Jaringan Lain-Lain	9
Mesin Hitung Manual	1
meteran	1
Mixer PVC	1
Note Book	22
P.C. Unit	48
Laptop	4
Papan Pengumuman	1
Papan Nama Instansi	3
Papan Visual/Papan Nama	1
Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	1
Professional Sound System	1
Perforator Besar (Perforator Besar)	2
perlengkapan reklame (perlengkapan reklame)	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	33
Printer (Peralatan Personal Komputer) (Printer)	6
Proyektor + Attachment (Proyektor + Attachment)	2
Rol Meter (Roll Meter)	6
Router (Router)	1
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3
Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	12
Station Wagon (Station Wagon)	5
Sepeda Motor (Sepeda Motor)	40
Server (Server)	1
Sofa (Sofa)	3
Peralatan Jaringan Lain-Lain (Solid State Disk)	5
SSD Server (SSD (perangkat server))	0
Switch(Switch HUB)	1
Telephone Hybrid	2

White Board Elektronik (White Board Elektronik)	1
Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)	2
Alat Ukur Universal Lain-Lain	2
Total	474

Sumber: Kartu Inventaris Bapenda, 2024

3. Pembiayaan

Pada tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mendapat pagu anggaran sebesar Rp17.666.541.439. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan dan 36 sub kegiatan sebagaimana tabel berikut

Tabel 5 Anggaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.175.457.439
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.586.542.864
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.546.490.864
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.052.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.717.900
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.234.000
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.541.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.765.700
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.641.200
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.539.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.997.000

IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.866.000
1	Pengadaan Mebel	10.131.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.735.000
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.625.675
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.872.275
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.185.400
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.968.000
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.705.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.500.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.009.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.196.000
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.491.084.000
I	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.491.084.000
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	15.000.000
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	15.000.000
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	42.513.000
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	66.150.000
5	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	158.000.000
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10.000.000
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	540.000.000
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	103.850.000
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	50.000.000
11	Penagihan Pajak Daerah	3.013.347.000

12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	15.000.000
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	90.000.000
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	342.224.000
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.000.000
Total Anggaran		17.666.301.439

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. Pada bab ini disajikan pula data umum organisasi yang meliputi personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang meliputi tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Pada bab ini disajikan pula rencana kinerja yang meliputi program dan kegiatan tahun 2024, serta disajikan pula perjanjian kinerja tahun 2024 mulai pejabat tertinggi sampai staf.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi tahun 2024, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir RPJMD dan dengan realisasi nasional. Disajikan pula analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan dan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya serta realisasi anggaran tahun 2024.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan mengenai perencanaan dan akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2024. Dalam bab ini disajikan pula permasalahan dan solusi yang ditempuh beserta saran untuk perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 memiliki tujuan adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Pendapatan Daerah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

”Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Visi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visinya tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

**“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta
Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya
Optimalisasi Reformasi Birokrasi”**

Misi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan misi ke 5 (lima) dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

3. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sementara itu, Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (*goal*) serta dapat memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**”Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terhadap Pendapatan Daerah”**

4. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka pendek (1 tahun). Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah :

**“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dan
“Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah”**

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun sebagai berikut

Tabel 6 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{PAD Tahun } n - \text{PAD Tahun } n - 1}{\text{PAD Tahun } n - 1} \times 100\%$	2,58 %
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Penilaian dari Inspektorat	87,53

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2022 dimulai sejak tahun 2021 yang mendasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 secara garis besar sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Internal yang Terlayani dengan Baik	IKM internal Bapenda
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi PD Yang Tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang Tersusun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang Tersusun
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah
Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terbayarkan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Terbayarkan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/Tenaga Pengamanan/Sopir yang Menerima Gaji/Honor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Baik	Jumlah STNK yang Terlunasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak
	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah
	Meningkatnya Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penilaian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penilaian yang Tersusun
	Tersedianya Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia
	Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah yang Tersusun
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Analisa Potensi dan Kebijakan Pajak Daerah yang Tersusun
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terseenggaranya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Pajak Daerah yang Tersusun
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersusunnya Database Obyek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang Telah Didata dan Dimutakhirkan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersusunnya Dokumen Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Obyek Pajak yang Telah Dilakukan Penilaian Baik Massal Maupun Individual
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terseenggaranya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan yang Tersedia
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pajak Daerah yang Tersusun
Penagihan Pajak Daerah	Tersusunnya laporan penagihan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Penagihan Pajak Daerah yang Tersusun
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya Permohonan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Berkas Keberatan Pajak Daerah yang Terselesaikan
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak Daerah yang Tersusun
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Retribusi Daerah yang Tersusun

Gambar 5 Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja tahun 2024 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Kepala Badan (Eselon 2) berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut :

Tabel 7 Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	2,58%
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	87,53

Penandatanganan perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan pada bulan Januari 2024, yang isinya merupakan penjabaran dari IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun Perjanjian Kinerja untuk eselon III sampai dengan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Eselon III
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2024

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah yang tersusun	6 dokumen	Sekretaris
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	15 laporan	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	100%	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	7 jenis	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	75 unit	
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,53%	Kabid Perencanaan dan Penetapan
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,28%	Kabid Pelayanan dan Penagihan
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah Dan PAD Lainnya	1,88%	Kabid Pengawasan dan Pelaporan

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Eselon IV
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2024

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket	
1	2	3	4	5	
I Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	4 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD yang tersusun	5 Laporan		
II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	43 orang	Kasubag Keuangan	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	3 Laporan		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulana/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		
III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	1 Paket	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Peserta		
IV Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket		
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	3 paket		
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang tersedia	1 paket		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan	3 dokumen		

		perundang-undangan yang tersedia		
--	--	----------------------------------	--	--

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket	
1	2	3	4	5	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
V Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
1	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang tersedia	3 unit		
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	12 unit		
VI Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		
VII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	25 unit		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 unit		
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	58 unit		

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 unit	

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	2	3	4	5
VIII Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah yang Tersusun	4 Dokumen	JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 laporan	
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	4 laporan	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	180.000 obyek pajak	Kasubbid Penetapan
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 dokumen	Kasubbid Penetapan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 unit	Jabatan Fungsional Pelayanan dan Konsultasi
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 layanan	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 dokumen	Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan
11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen	Kasubbid Penagihan
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 dokumen	Kasubbid Penagihan
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	Jabatan Fungsional Pengawasan dan Pemeriksaan
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 laporan	Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 laporan	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pencapaian Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2022, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85 – 100	=	Sangat baik/sangat berhasil ;
70 - < 85	=	Baik/berhasil ;
55 - < 70	=	Kurang baik/kurang berhasil ;
< 55	=	Sangat kurang baik/tidak berhasil.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan

selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Berikut disajikan hasil Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan:

Tabel 10 Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan
Tahun 2024

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI				Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	2,58%	16,00%	9,59%	-0,60%	0,97%	5,82%	225,58%
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	87,53	86,73	86,73	Nunggu dr inspektorat	Nunggu dr inspektorat	-	-
Rata-rata									%

Berdasarkan tabel 10 di atas, sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah belum bias terlihat rata-rata tercapainya karena nilai SAKIP belum rilis. Sasaran Kinerja yang pertama yakni Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Persentase Peningkatan PAD terealisasi sebesar 5,82% dari target 2,58% atau tercapai sebesar 225,58%. Sedangkan untuk Sasaran Kinerja yang kedua dengan indikator Nilai SAKIP Bapenda belum ada data karena belum ada realisasi penilaian dari Inspektorat.

Evaluasi dan analisis secara rinci terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sasaran Strategis yang pertama yakni Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Indikator persentase peningkatan PAD terealisasi sebesar 9% dari target 2,58% atau tercapai sebesar 346%. Hal ini karena adanya kenaikan pada Pajak Daerah walaupun ada penurunan dari sektor Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain Lain PAD yang sah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11 Persentase Peningkatan PAD Tahun 2024

No	Jenis PAD	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp.	%
1.	Pajak Daerah	160.188.575.701,56	177.700.391.208,00	17.511.815.506,44	10,93%
2.	Retribusi Daerah	119.937.973,00	108.685.107,00	-11.252.866,00	-9,38%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan	17.248.059.334,38	15.696.228.350,36	-1.551.830.984,02	-9,00%

No	Jenis PAD	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp.	%
	Daerah yang Dipisahkan				
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	114.084.673,00	47.091.329,00	-66.993.344,00	-58,72%
	Jumlah	177.670.657.681,9 4	193.552.395.994,3 6	15.881.738.312,4 2	9%

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 9%. Dari sektor Pajak Daerah meningkat sebesar 10,93%, namun sektor Retribusi Daerah menurun sebesar -9,38%, untuk sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah menurun sebesar -9% dan Lain-Lain PAD yang Sah menurun sebesar -58,72%.

a. Pajak Daerah

Sektor pajak daerah terealisasi sebesar Rp177.700.391.208,00 atau sebesar 103,25% dari target Rp172.098.755.489,00. Realisasi ini meningkat sebesar 10,93% bila dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 12 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2024

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Pajak Hotel	2.029.229.856,00	2.126.680.480	97.450.624,00	4,80%
2.	Pajak Restoran	9.569.023.252,00	10.208.783.245	639.759.993,00	6,69%
3.	Pajak Hiburan	5.401.799.358,00	5.161.504.626	-240.294.732,00	-4,45%
4.	Pajak Reklame	2.759.168.718,00	2.778.292.852	19.124.134,00	0,69%
5.	Pajak Penerangan Jalan	69.009.324.039,00	75.393.379.739	6.384.055.700,00	9,25%
6.	Pajak Parkir	1.219.526.677,00	1.128.891.251	-90.635.426,00	-7,43%

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan	
				Rp.	%
7.	Pajak Air Tanah	810.353.934,50	1.101.986.144	291.632.209,50	35,99%
8.	Pajak Sarang Burung Walet	8.030.000,00	6.485.000	-1.545.000,00	-19,24%
9.	Pajak Minerba	1.134.678.200,00	1.339.089.900	204.411.700,00	18,01%
10.	PBB-P2	44.740.742.993,06	49.932.192.649	5.191.449.655,94	11,60%
11.	BPHTB	23.506.698.674,00	28.523.105.322	5.016.406.648,00	21,34%
	JUMLAH	160.188.575.701,56	177.700.391.208	17.511.815.506,44	10,93%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 11 jenis pajak daerah terdapat 8 jenis pajak daerah mengalami peningkatan, antara lain : Pajak Hotel meningkat sebesar 4,8%, Pajak Restoran meningkat sebesar 6,69%, Pajak Reklame meningkat sebesar 0,69%, Pajak Penerangan Jalan meningkat sebesar 9,25%, Pajak Air Tanah meningkat sebesar 35,99% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meningkat sebesar 18,01% dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meningkat sebesar 11,60% dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Batuan meningkat sebesar 21,34%. Sedangkan 3 jenis pajak daerah yang mengalami penurunan yaitu Pajak Hiburan menurun sebesar -4,45%, Pajak Parkir menurun sebesar -7,43%, Pajak Sarang Burung Walet menurun sebesar -19,24%.

2) Retribusi Daerah

Sektor retribusi daerah terealisasi sebesar Rp 17.863.416.952,00 atau sebesar 92,07% dari target Rp19.401.038.840,00. Realisasi ini menurun sebesar -5,06% bila dibanding tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena dari 15 jenis retribusi terdapat ada 4 jenis retribusi yang mengalami penurunan, 5 jenis retribusi mengalami peningkatan, dan 4 jenis retribusi dihapuskan, ada 2 tambahan jenis retribusi daerah di tahun ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	60.302.500,00	68.538.000,00	8.235.500,00	13,66%
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	-
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.856.245,00	7.854.894,50	(1.350.500,00)	-0,02%
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	871.736.000,00	0,00	-871.736.000,00	-100,00%
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	75.160.000,00	0,00	-75.160.000,00	-100,00%
6.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	151.056.900,00	0,00	-151.056.900,00	-100,00%
7.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.056.713,49	0,00	-1.056.713,49	-100,00%
8.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.754.781,93	2.450.157,72	695.375,795	39,63%
9.	Retribusi Tempat Pelelangan	2.246.687,07	2.197.935,00	(48.752,075)	-2,17%
10.	Retribusi Terminal	30.248.000,00	29.400.000,00	(848.000,00)	-2,80%
11.	Retribusi Rumah Potong Hewan	250.245.000,00	280.200.000,00	29.955.000,00	11,97%
12.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.663.665,00	1.607.358,00	(56.306,999)	-3,38%
13.	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus	0	12.300.000,00	12.300.000	-

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan	
				Rp.	%
	Parkir Diluar Badan Jalan				
14	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.049.135.633,00	2.459.716.523,00	410.580.890,00	20,04%
15	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	750.330.000,00	898.417.200,00	148.087.200,00	19,74%
	JUMLAH	18.816.306.531,00	17.863.416.952,00	-952.889.579,00	-5,06%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 15 retribusi daerah terdapat 5 jenis retribusi daerah mengalami peningkatan, antara lain : Retribusi Pelayanan Kesehatan meningkat sebesar 13,66%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meningkat sebesar 39,63%, Retribusi Rumah Potong Hewan meningkat sebesar 11,97%, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung meningkat sebesar 20,04%, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) meningkat sebesar 19,74%.

Sedangkan 4 jenis retribusi daerah lainnya mengalami penurunan antara lain : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menurun sebesar 0,02%, Retribusi Tempat Pelelangan menurun sebesar -2,17%, Retribusi Terminal menurun sebesar -2,80%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga menurun sebesar -3,38%, lalu ada 4 jenis retribusi yang dihapuskan ditahun 2024 yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Lalu, ada 2 jenis retribusi baru di tahun 2024 yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan teralisasi sebesar Rp4500.000 dan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan terealisasi sebesar Rp12.300.000.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari Dividen BUMD terealisasi sebesar Rp15.696.228.350,36 atau sebesar 83,79% dari target Rp18.733.767.826,00 dan ditambah dengan Dividen dari Bank Jatim sebesar Rp5.510.703.152,85 atau sebesar 104,97% dari target sebesar Rp5.250.000.000,00. Realisasi ini menurun sebesar -6,28% bila dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 14 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Dividen dari PT. BANK JATIM	5.378.989.343,35	5.510.703.152,85	131.713.809,50	2,45%
2.	Dividen dari PD Bank Daerah	4.153.125.685,38	5.121.490.384,36	968.364.698,98	23,32%
3.	Dividen dari Lamongan Integreted Shorebase	577.950.111,00	657.912.417,00	79.962.306,00	13,84%
4.	Dividen dari Aneka Usaha Lamongan Jaya	350.000.000,00	163.000.000,00	-187.000.000,00	-53,43%
5.	Dividen dari PD Pasar Lamongan	1.250.000.000,00	600.000.000,00	-650.000.000,00	-52,00%
6.	Dividen dari PT Wisata Bahari Lamongan	6.750.000.000,00	3.000.000.000,00	-3.750.000.000,00	-55,56%

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan	
				Rp.	%
7.	Dividen dari PDAM	4.166.983.538,00	6.153.825.549,00	1.986.842.011,00	47,68%
	JUMLAH	22.627.048.677,73	21.206.931.503,21	- 1.420.117.174,52	-6,28%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 7 Dividen BUMD terdapat 4 dividen BUMD yang mengalami peningkatan, antara lain ; dividen dari Bank Jatim meningkat sebesar 2,45%, dividen PD Bank Daerah meningkat sebesar 23,32%, dividen Lamongan Integrated Shorebase meningkat sebesar 13,84%, dividen dari PDAM meningkat sebesar 47,68%, Sedangkan 3 dividen BUMD mengalami penurunan yakni : dividen Aneka Usaha Lamongan Jaya menurun sebesar -53,43%, dividen dari PD Pasar Lamongan menurun sebesar -52%, dividen dari PT Wisata Bahari Lamongan menurun sebesar -55,56%.

4) Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp345.354.851.955,53 atau sebesar 99,77% dari target Rp346.166.273.830,00. Realisasi ini meningkat sebesar 2,98% bila dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tabel di bawah.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 12 jenis Lain-Lain PAD yang Sah, terdapat 2 jenis Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan antara lain Pendapatan BLUD meningkat sebesar 6,36%, Pendapatan dari Pengembalian meningkat sebesar 49,70%, sedangkan 5 jenis Lain-Lain PAD yang Sah mengalami penurunan antara lain Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan menurun sebesar -57%, Jasa Giro menurun sebesar -64,37%, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan menurun 100%, Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan menurun 100%, Pendapatan dari

Pengembalian Lainnya menurun 100%,. Terdapat 3 jenis Lain-Lain PAD yang Sah yang tidak ada realisasinya baik tahun 2023 maupun 2024 yaitu Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Tabel 15 Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.103.940.800,00	1.759.949.269	(2.343.991.531,00)	-57%
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0	-	0	0%
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	133.650.000,00	133.650.000	-	0%
4.	Jasa Giro	1.696.765.014,04	604.542.077	(1.092.222.937,54)	-64,37%
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	63.320.333,59	-	-63.320.333,59	-100,00%
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	114.084.673,00	47.071.237	(67.013.436,00)	-58,74%
7.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0	-	0,00	0,00%
8.	Pendapatan BLUD	317.288.589.068,18	337.483.698.070	20.195.109.001,79	6,36%
9.	Pendapatan dari Pengembalian	3.557.648.183,71	5.325.941.303	1.768.293.119,35	49,70%

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan	
				Rp.	%
10.	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	1.668.496,99	0	(1.668.496,99)	-100,00%
11.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	0	0	0
12.	Pendapatan dan Pengembalian Lainnya	17.953.282,07	-	(17.953.282,07)	-100,00%
	JUMLAH	326.975.951.354,59	345.354.851.956	9.346.699.194,93	2,86%

II. Sasaran Strategis Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Sasaran Strategis yang kedua yakni Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai SAKIP Bapenda sampai dengan Laporan LPPD ini disusun belum ada data di triwulan III dan IV karena nilai SAKIP belum diliris oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan., sebagaimana tabel berikut.

Tabel 16 Nilai SAKIP Bapenda Tahun 2024

INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2023	TARGET KINERJA 2024					REALISASI 2024				CAPAIAN 2024			
		TAHUN 2024	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
Nilai SAKIP Bapenda	87,50	87,53	-	-	-	-	86,73	86,73	Menunggu dari inspektorat					

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023			TAHUN 2024			SELISIH
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	1,50%	1,40%	93,33%	2,58%	5,82%	225,58%	315,71%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	87,52	87,5	99,98%	87,53	menunggu dari inspektorat		-
Rata-Rata					96,66%			-	

Dari tabel tersebut terlihat capaian realisasi kinerja tahun 2024 dilihat dari sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dilihat dari indikator Persentase Peningkatan PAD tahun 2024 tercapai 225,58%. sedangkan tahun 2023 tercapai sebesar 93,33% sehingga terdapat peningkatan sebesar 315,71%, Untuk sasaran Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan dilihat dari indikator Nilai SAKIP Bapenda pada Tahun 2024 belum ada data karena belum rilis penilaian dari inspektorat sedangkan tahun 2023 tercapai sebesar 99,98%.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD/Renstra.

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 bila dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode RPJMD/Renstra bisa dilihat pada tabel berikut berikut :

Tabel 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR	2024		TARGET AKHIR PERIODE RPJMD	TINGKAT KEMAJUAN
			TARGET	REALISASI		
I	II	III	IV	V	VI	VII
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	2,58%	5,82%	2,60%	223,85%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	87,53	Menunggu inspektorat	87,55	
Rata - Rata						-

Dari tabel tersebut belum terlihat rata-rata realisasi kinerja tahun 2024 bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD/Renstra karena nilai SAKIP belum rilis. Untuk sasaran kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan

indikator kinerja Persentase Peningkatan PAD terdapat tingkat kemajuan sebesar 223,85%, sedangkan sasaran kinerja Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah untuk Indikator Nilai SAKIP Bapenda belum ada data diketahui tingkat kemajuannya karena belum ada rilis penilaian inspektorat.

4) Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas antara lain:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kompetensi pegawai yang terus menerus ditingkatkan;
3. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Adanya regulasi yang jelas terkait pendapatan daerah;
5. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*).

Tujuan dari *Cost per Outcome* adalah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan

keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Perhitungan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 19 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI
I	II	III	IV	V	VI
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	225,58%	93,17%	58,70%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	-	-	-
Rata - Rata					

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk sasaran kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan PAD indikator Presentase Peningkatan PAD terdapat efisiensi 58,70%, sedangkan sasaran kinerja Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Sakip Bapenda belum ada data karena diketahui efisiensinya karena SAKIP belum rilis penilaian dari inspektorat.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

Terdapat 2 program, 8 kegiatan dan 36 Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja. Pada tabel .. dan tabel .. menyajikan capaian kinerja program dan kinerja kegiatan tahun 2024

Tabel 20 Capaian Kinerja Program
Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal Bapenda	84,58	90,07	106,49%	13.175.457.439	12.306.915.265	93,41%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,53%	0,92%	173,58%	4.491.084.000	4.152.970.117	92,47%
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,28%	10,83%	330,18%			

		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	1,88%	3,64%	193,62%		
		Rata - Rata			232,46%		
		Rata - Rata Kinerja			169,48%		92,94%

Dari tabel capaian kinerja program di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja program adalah sebesar 169,48% dengan rincian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai kinerja sebesar 106,49% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tercapai kinerja sebesar 232,46%. Adapun realisasi anggaran rata-rata kinerja tercapai sebesar 92,94% dengan rincian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai sebesar 93,41% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tercapai sebesar 92,47%.

Tabel 21 Capaian Kinerja Kegiatan

Tahun 2024

No	Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100%	75.000.000	73.373.911	97,83%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 laporan	15 laporan	100%	11.586.542.864	10.752.710.653	92,80%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	144.717.900	137.064.000	94,71%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7 jenis	7 jenis	100%	49.866.000	47.870.000	96,00%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.050.625.675	1.031.728.339	98,20%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 unit	76 unit	100%	268.705.000	264.168.362	98,31%
7	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	4.491.084.000	4.152.970.117	92,47%
8		15 jenis	15 jenis	100%			
9		12 laporan	12 laporan	100%			
Rata-Rata				100%	Rata - Rata		95,76%

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja kegiatan tercapai sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,76%, sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 4,24%. Selanjutnya untuk capaian kinerja sub kegiatan sebagaimana tabel di bawah, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 94,34%, sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 5,66%.

Tabel 22 Capaian Kinerja Sub Kegiatan
Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	20.000.000	19.634.000	98,17%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	5 laporan	100,00 %	55.000.000	53.739.911	97,71%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	43 orang/bulan	100,00 %	11.546.490.864	10.713.203.053	92,78%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan	100,00 %	20.052.000	19.540.800	97,45%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00 %	20.000.000	19.966.800	99,83%

No	Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100,00 %	8.234.000	8.230.300	99,96%
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	100,00 %	11.541.000	11.450.000	99,21%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket	100,00 %	56.765.700	52.739.400	92,91%
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100,00 %	23.641.200	22.261.300	94,16%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 dokumen	3 dokumen	100,00 %	14.539.000	13.680.000	94,09%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100,00 %	29.997.000	28.703.000	95,69%
12	Pengadaan Mebel	3 unit	3 unit	100,00 %	10.131.000	9.570.000	94,46%
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit	100,00 %	39.735.000	38.300.000	96,39%
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	100,00 %	4.600.000	4.592.000	99,83%
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	4 laporan	100,00 %	449.872.275	448.958.535	99,80%
16	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 laporan	4 laporan	100,00 %	10.185.400	5.497.400	53,97%

No	Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	4 laporan	100,00 %	585.968.000	572.680.404	97,73%
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 unit	25 unit	100,00 %	22.500.000	18.305.800	81,36%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 unit	25 unit	100,00 %	205.009.000	204.969.000	99,98%
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58 unit	58 unit	100,00 %	15.000.000	14.993.000	99,95%
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 uni	1 uni	100,00 %	26.196.000	25.900.562	98,87%
22	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	15.000.000	13.940.000	92,93%
23	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	15.000.000	14.646.450	97,64%
24	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00 %	42.513.000	37.250.000	87,62%

No	Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
25	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 unit	11 unit	100,00 %	66.150.000	65.447.600	98,94%
26	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00 %	158.000.000	148.582.003	94,04%
27	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00 %	10.000.000	9.812.400	98,12%
28	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	180000 objek pajak	180000 objek pajak	100,00 %	20.000.000	19.785.750	98,93%
29	Penetapan Wajib Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	540.000.000	530.520.800	98,24%
30	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 layanan	6 layanan	100,00 %	103.850.000	100.420.000	96,70%
31	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	50.000.000	47.835.700	95,67%
32	Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	3.013.347.000	2.746.785.820	91,15%
33	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	15.000.000	14.520.000	96,80%

No	Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
34	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00 %	90.000.000	64.125.000	71,25%
35	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00 %	342.224.000	329.539.500	96,29%
36	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00 %	10.000.000	9.759.094	97,59%
Rata -Rata				100,00 %	Rata -Rata		94,34 %

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar sebesar Rp16.459.885.382 atau mencapai 93,17% dari total pagu Rp 17.666.541.439 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 23 Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.175.457.439	12.306.915.265	93,41%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000	73.373.911	97,83%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	19.634.000	98,17%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.000.000	53.739.911	97,71%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.586.542.864	10.752.710.653	92,80%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.546.490.864	10.713.203.053	92,78%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.052.000	19.540.800	97,45%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.000.000	19.966.800	99,83%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	144.717.900	137.064.000	94,71%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.234.000	8.230.300	99,96%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.541.000	11.450.000	99,21%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.765.700	52.739.400	92,91%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.641.200	22.261.300	94,16%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.539.000	13.680.000	94,09%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.997.000	28.703.000	95,69%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.866.000	47.870.000	96,00%
Pengadaan Mebel	10.131.000	9.570.000	94,46%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.735.000	38.300.000	96,39%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.625.675	1.031.728.339	98,20%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000	4.592.000	99,83%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.872.275	448.958.535	99,80%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.185.400	5.497.400	53,97%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.968.000	572.680.404	97,73%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.705.000	264.168.362	98,31%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.500.000	18.305.800	81,36%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.009.000	204.969.000	99,98%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	14.993.000	99,95%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.196.000	25.900.562	98,87%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.491.084.000	4.152.970.117	92,47%
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.491.084.000	4.152.970.117	92,47%
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	15.000.000	13.940.000	92,93%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	15.000.000	14.646.450	97,64%

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	42.513.000	37.250.000	87,62%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	66.150.000	65.447.600	98,94%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	158.000.000	148.582.003	94,04%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10.000.000	9.812.400	98,12%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.000.000	19.785.750	98,93%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	540.000.000	530.520.800	98,24%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	103.850.000	100.420.000	96,70%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	50.000.000	47.835.700	95,67%
Penagihan Pajak Daerah	3.013.347.000	2.746.785.820	91,15%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	15.000.000	14.520.000	96,80%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	90.000.000	64.125.000	71,25%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	342.224.000	329.539.500	96,29%
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.000.000	9.759.094	97,59%
Jumlah	17.666.541.439	16.459.885.382	93,17%

Adapun rincian penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,17% dan fisik sebesar 100%.

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp55.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen evaluasi kinerja. Adapun realisasi keuangan sebesar 97,71% dan fisik sebesar 100%.

b. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.546.490.864,00 yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan 43 orang ASN Bapenda. Adapun realisasi keuangan sebesar 92,78% dan fisik sebesar 100%;

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.052.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun. Adapun realisasi keuangan sebesar 97,45% dan fisik sebesar 100%;

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,83% dan fisik sebesar 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.234.000,00 yang dipergunakan untuk penyediaan komponen alat listrik kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,96% dan fisik sebesar 100%;
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.541.000,00 yang dipergunakan untuk penyediaan peralatan rumah tangga kantor seperti lemari dan alat pendingin. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,21% dan fisik sebesar 100%;
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.765.700,00 yang dipergunakan untuk penyediaan alat tulis kantor, kertas dan keperluan komputer. Adapun realisasi keuangan sebesar 92,91% dan fisik sebesar 100%;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.641.200,00 yang dipergunakan untuk pengadaan barang cetak/penggandaan berupa ncr, kartu disposisi, dna fotokopi, Adapun realisasi keuangan sebesar 94,16% dan fisik sebesar 100%;

- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.539.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan bahan bacaan surat kabar/majalah (108 eksemplar surat kabar), Adapun realisasi keuangan sebesar 94,09% dan fisik sebesar 100%.
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan alokasi anggaran Rp 29.997.000,00 yang dipergunakan untuk rapat koordinasi berupa makanan dan minuman, biaya perjalanan dinas kepala badan , Adapun realisasi keuangan sebesar 95,69% dan fisik sebesar 100%.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.131.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian kursi rapat 33 unit, Adapun realisasi keuangan sebesar 94,46% dan fisik sebesar 100%.
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39.735.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian printer, personal computer. Adapun realisasi keuangan sebesar 96,39% dan fisik sebesar 100%.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.600.000,00 yang dipergunakan untuk membeli benda pos(460

materai), Adapun realisasi keuangan sebesar 99,83% dan fisik sebesar 100%;

- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp449.872.275,00 yang dipergunakan untuk pembayaran tagihan telepon, OCA blast, dan internet, Adapun realisasi keuangan sebesar 99,80% dan fisik sebesar 100%;
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.185.400,00 yang dipergunakan untuk membeli alat pemeliharaan peralatan rumah tangga dan perabot kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar 53,97% dan fisik sebesar 100%;
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp585.968.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer sebanyak 26 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar 97,73% dan fisik sebesar 100%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 22.500.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (30 sepeda motor dan 6 mobil). Adapun realisasi keuangan sebesar 81,36% dan fisik sebesar 100%;
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp266.305.900,00 yang dipergunakan untuk service kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, pembelian suku cadang alat angkutan, oli dan pembelian BBM pertalite. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,98% dan fisik sebesar 100%;

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor (servis CPU dan komputer, printer, dan laptop, 2 unit AC). Adapun realisasi keuangan sebesar 99,95% dan fisik sebesar 100%;
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.196.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,87% dan fisik sebesar 100%;

h. Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah (4 dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar 92,93% dan fisik sebesar 100%;
- 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen SOP (4 dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar 97,64% dan fisik sebesar 100%;
- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.513.000,00 yang dipergunakan untuk

penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah (4 laporan). Adapun realisasi keuangan sebesar 87,62% dan fisik sebesar 100%;

- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.150.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan blanko SSPD, cetak stiker PBB P-2, B-26. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,94% dan fisik sebesar 100%;
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp158.000.000 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen Zona Nilai Tanah di Kabupaten Lamongan, cetak LSPOP, CETAK SPOP, perjalanan dinas, belanja jasa konsultasi, PDL. Adapun realisasi keuangan sebesar 94,04% dan fisik sebesar 100%;
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 yang dipergunakan untuk jasa konsultan atas laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,12% dan fisik sebesar 100%;
- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 yang dipergunakan untuk bayar jasa konsultasi penilaian penyesuaian NJOP. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,93% dan fisik sebesar 100%;

- 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp540.000.000,00 yang dipergunakan untuk pencetakan SPPT dan DHKP PBB, biaya operasional penyampaian SPPT PBB P2 dan tenaga cetak SPPT PBB P2 2023. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,24% dan fisik sebesar 100%;
- 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp103.850.000,00 yang dipergunakan untuk makanan dan minuman sosialisasi pajak daerah dan jasa integrasi aplikasi sipalin. Adapun realisasi keuangan sebesar 96,70% dan fisik sebesar 100%;
- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00 yang dipergunakan untuk bahan computer, makanan dan minuman rapat, jasa konsultasi, biaya perjalanan dinas guna penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar 95,67% dan fisik sebesar 100%;
- 11) Penagihan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.013.347.000,00 yang dipergunakan untuk penyisiran PBB di Desa-Desa se Kab. Lamongan, souvenir penghargaan PBB P2 bagi desa yang tercepat lunas. Adapun realisasi keuangan sebesar 91,15% dan fisik sebesar 100%;
- 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan

penyelesaian keberatan pajak daerah dan perjalanan dinas lapangan.

Adapun realisasi keuangan 96,80% dan fisik sebesar 100%;

13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.000.000,00 yang dipergunakan untuk makanan dan minuman rapat, PDL, honorarium narasumber dan moderator pendampingan pengawasan wajib pajak, honorarium naraumber tapping box, belanja sosialisasi, belanja perjalanan dinas untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar 71,25% dan fisik sebesar 100%;

14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp342.224.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen pembinaan dan pengawasan retribusi daerah serta pembayaran gaji petugas cheker sebanyak 18 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar 96,29 dan fisik sebesar 100%.

15) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.000.000,00 yang dipergunakan untuk laporan ETPD. Adapun realisasi keuangan sebesar 97,59% dan fisik sebesar 100%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran kinerja Bapenda yang pertama yakni Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Persentase Peningkatan PAD terealisasi sebesar 5,82% dari target 2,58% atau tercapai sebesar 225,58%. Sedangkan untuk Sasaran Kinerja yang kedua dengan indikator Nilai SAKIP Bapenda belum ada data karena belum rilis penilaian dari inspektorat untuk tahun 2024, target nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 87,53. Untuk realisasi nilai SAKIP tahun 2023 tercapai sebesar 87,50.
2. Tingkat efisiensi sasaran strategis Badan Pendapatan untuk Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat efisiensi sebesar 58,70%,

sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Bapenda belum diketahui efisiensinya karena belum ada rilis penilaian SAKIP dari Inspektorat untuk tahun 2024.

3. Capaian kinerja program tercapai sebesar 169,48%, dan realisasi anggaran sebesar 92,94%. sehingga terdapat efisiensi sebesar 45,16%. Capaian kinerja kegiatan tercapai sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,76% sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 4,24%. Sedangkan untuk capaian kinerja sub kegiatan tercapai sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 94,34% sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 5,66%.

B. Saran

Beberapa langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja ke depan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi secara intens baik melalui media cetak maupun elektronik.
- b. Meningkatkan kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah melalui Pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait pajak daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran data (*updating data*) obyek/subyek pajak daerah dan giat pendataan potensi-potensi pajak baru.
- d. Meningkatkan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
- f. Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan penggalian potensi pajak-pajak baru.
- g. Melakukan perawatan server pajak daerah secara berkala.

Sebagai bagian penutup, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang.